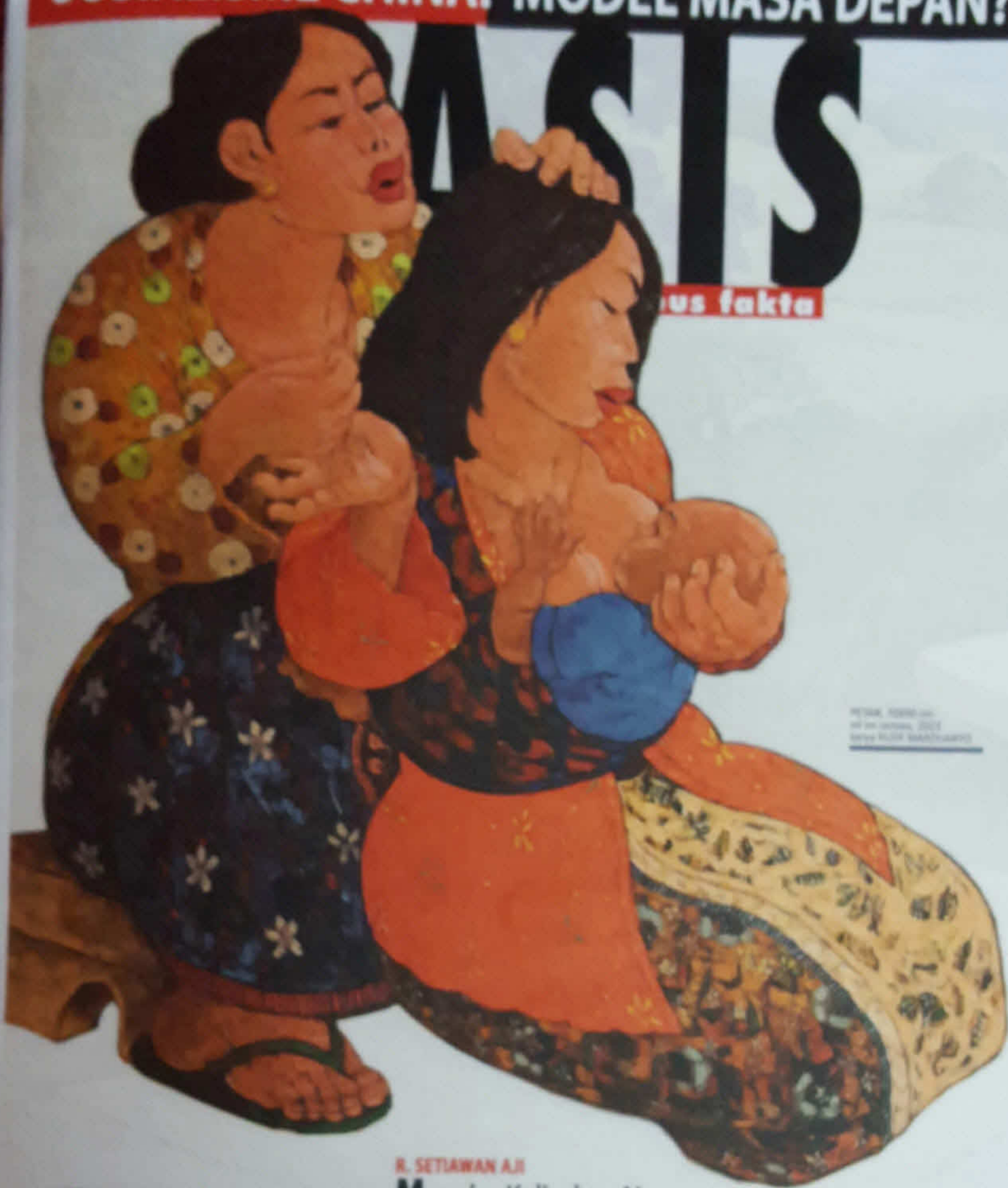


**SOSIALISME CHINA: MODEL MASA DEPAN?**

# MAKSIS

plus fakta



PELUANG, FEBRUARI 2023  
NO 09 - JUNI 2023  
BESAR Rp 30.000,00

**HERU PRABOWA**

**Etika Politik:  
Tegangan Penuh Riak**

**R. SETIAWAN AJI**

**Menalar Kelindan AI,  
Big Data, dan  
Persoalannya**

**ABDUL AZIZ RASJID**

**Arsip Sastra:  
Telaah dan Algoritma**

Rp 30.000,00

DUA BULANAN, NOMOR 09 - 10, TAHUN KE-72, 2023

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.  
Jo Ditjen PPG  
Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996  
Penerbit

**Yayasan BP Basis**  
Anggota SPS ISSN: 0005-6138  
Penasihat

**Franz Magnis-Suseno**

Pemimpin Umum  
**Sindhunata**

Pemimpin Redaksi

**A. Setyo Wibowo**

Wakil Pemimpin Redaksi  
**A. Sudiarja**

Dewan Redaksi

**B. Hari Julawan**

**Heru Prakosa**

**A. Bagus Laksana**

Redaktur Pelaksana

**C. Bayu Risanta**

Redaktur

**Dian Vita Ellyati**

**Francisca Purnawijayanti**

Redaktur Artistik

**Hari Budiono**

Sekretaris Redaksi

**Anang Pramuriyanto**

Promosi/ Iklan

**Slamet Riyadi, A. Yulianto**

**Willy Putranta**

Administrasi/ Distribusi

**Maria Dwijayanti**

Dokumentasi

**Francisca Triharyani**

Keuangan

**Ani Ratna Sari**

**Widarti**

**Alamat**

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta  
Telepon: 0812225423, Faks: (0274) 546811

**Surel administrasi/distribusi:**

basis.adisi@gmail.com

**Surel redaksi:** majalahbasis@gmail.com

**Rekening:**

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,

BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

**KACABENGGALA / Heru Prakosa**  
Etika Politik: Tegangan Penuh Riak ... 2

**SOSIAL / Franz Magnis-Suseno**  
Sosialisme China: Model Masa Depan? ... 16

**SOSIAL / R. Setiawan Aji Nugroho**  
Menalar Kelindan AI, Big Data, dan Persoalannya ... 23

**BUKU / Y. Sumardiyanto**  
Dalam Segala Mencintai dan Melayani ... 27

**BUKU / St. Sularto**  
Snouck Hurgronje Plus-Minus ... 31

**SASTRA / Abdul Aziz Rasjid**  
Arsip Sastra: Telaah dan Algoritma ... 34

**SOSIAL / Aris Setiawan**  
Gending, Dibunyikan untuk  
Tidak Sepenuhnya Didengarkan... 39

**LAPORAN / Khalifah Anggara Puri Mahacinta**  
Bukan Sembarang Sekolah ... 42

**PUISI / Beda Holy Septiano**  
Elegi Privasi ... 46  
Putri A ... 47  
Jalan Bahagia ... 48  
Perjamuan Tanpa Kata ... 49

**CERPEN / Boni Candra**  
Orang-orang Jakarta ... 50

**SOSIAL / Sindhunata**  
Jago Ratu Adil ... 56

KACABENGGALA



# Etika dan Politik: Tegangan Penuh Riak

HERU PRAKOSA



Lukisan karya AHMAD ALWI,  
"Mengayomi", AoC, 40x60 cm, 2023 | Bentara Budaya Yogyakarta

Dalam antologi *Mishkat al-Masabih*, Muhammad ibn ‘Abd Allah Khatib al-Tibrizi (m. 1340/1341) mengutip sebuah hadis atau tradisi kenabian yang diyakini bersifat autentik dan dapat dipercaya (*sahih*):  
 “Pemimpinmu akan menjadi cerminan dirimu.”

Dari hadis ini, kita dapat memetik dua poin yang berbeda, sekaligus terkait erat, antara etika dan politik. Di satu sisi, disposisi etis seseorang. Sisi yang lain adalah kepemimpinan. Disposisi etis individual dan sosial yang terbangun di tengah masyarakat tak dapat dipisahkan dari cara pandang dan cara bertindak pemimpinnya. Dengan demikian, perlu diidentifikasi pemimpin yang dapat membangun etika secara positif.

Etika dan politik saling berhubungan. Keduanya sering kali menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks dan rumit. Ini dapat dipahami, mengingat keputusan dan tindakan yang datang dari figur pemimpin politik memiliki konsekuensi yang luas bagi individu, masyarakat, bahkan komunitas global. Untuk menanggapi tantangan yang terkait dengan pengambilan keputusan politik, dibutuhkan pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip etika.

Seorang filsuf Yunani dari zaman Sebelum Masehi, Herakleitos, berkata, “Akal budi bersifat umum bagi semua orang, tetapi kebanyakan orang seolah-olah hidup sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki pengetahuan pribadi mereka sendiri” (Black, 2016, 3). Agar orang-orang dari latar belakang intelektual, moral, kultural, dan religius yang berbeda dapat saling memahami dan hidup bersama secara damai, perlu keterbukaan dan penghargaan satu sama lain. Pandangan dan kearifan yang dikembangkan oleh para pemikir dan kaum bijak tentang politik dari masa ke masa, dan dari peradaban satu ke peradaban lain, dapat memberi pencerahan dan memperluas wawasan.

#### Becerminal dalam Sejumlah Peradaban

Dalam peradaban Mesir kuno, orang dibuat terpesona oleh unsur-unsur alam. Salah satunya adalah matahari. Pandangan dan perilaku orang-orang banyak tergantung pada kekuatan alam, termasuk matahari,

yang tampaknya bersikap “sewenang-wenang” atas diri mereka. Ini tak dapat dielakkan karena, bagaimanapun, alam terkait erat dengan hidup dan mata pencaharian mereka. Dalam hal ini, kepemimpinan Firaun diterima sebagai pihak yang memiliki relasi istimewa dengan para dewa dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola alam bagi kesejahteraan rakyat. Amenemhat I (m. 1952 SM) menyatakan:

Aku adalah orang yang menghasilkan jelai dan mencintai dewa jagung. Sungai Nil menghormati aku di setiap kenajisan. Tidak ada yang lapar atau haus di tahun-tahunku. (Frankfort, 1978: 17)

Ada keyakinan bahwa kepemimpinan dan perilaku Firaun yang benar akan membuat kosmos berjalan dengan semestinya, sehingga matahari akan tetap terbit dan Sungai Nil mengalirkan air demi terjaganya kemakmuran warga masyarakat. Kata kuncinya adalah penegakan kesejahteraan atas dasar keadilan (*maat*). Dewa matahari, Ra, telah menempatkan raja di bumi untuk mengatur warga. Etika kepemimpinan, dengan demikian, terkait erat dengan alam. Konsekuensinya, keberadaan semesta yang terbuka bagi semua pihak menuntut orang untuk melestarikan alam, bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi kepentingan bersama.

Risalah tertua tentang etika kepemimpinan dalam hidup bersama di peradaban Mesir adalah *The Instruction of Ptahhotep*. Risalah tersebut memuat nasihat tentang etika dan tata kelola birokrasi, termasuk pemeliharaan bangunan atau sarana-sarana publik, dan perayaan keagamaan, serta pertahanan. Dihadapkan pada tanggung jawab tersebut, pemimpin dituntut untuk bersikap murah hati, mau berbagi, dan tidak egois. Nilai-nilai sentral yang ditetapkan bagi pemimpin dan orang-orang kebanyakan, baik untuk perilaku individu dan sosial, adalah keadilan dan kebajikan. Itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Aku perlu menyelamatkan pihak yang lemah dari pihak yang lebih kuat sebaik mungkin, dan aku wajib memberikan roti kepada yang lapar, pakaian kepada yang telanjang. (Black, 2016: 25)

Dalam peradaban Mesopotamia, tatanan alam dan keteraturan sosial juga mendapat perhatian utama. Dalam konteks Sumeria, misalnya, seorang pemimpin dianggap perlu memiliki kualitas ideal, yang mencakup: kesempurnaan fisik, keberanian dalam bertindak, wawasan luas, dan sikap arif bijaksana terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Seperti di Mesir, ada pandangan bahwa raja berperan besar dalam melindungi orang miskin, lemah, dan tertindas dari pelanggaran hukum atau dominasi orang kaya serta berkuasa. Jadi, tekannya ada pada kebenaran, kearifan, dan kebijaksanaan. Prinsip tata kehidupan bersama yang diberlakukan lebih didasarkan pada kebenaran (*kittum*). Hammurabi (m. 1750 SM), dengan sebutan "Dewa Matahari dari Babilonia yang menyebabkan sinar memancar di tanah Sumeria dan Akadia", mengatakan bahwa dia telah diangkat menjadi raja "untuk menyebabkan kebenaran berlaku di negeri itu, untuk menghancurkan pihak-pihak yang jahat, agar yang kuat tidak boleh menindas yang lemah" (Black, 2016, 36 & 38). Karena itu, dia menuliskan hukum-hukum demi tegaknya keadilan bagi anak yatim dan janda. Tugas pemimpin adalah untuk menerapkan kebenaran, terutama dengan keputusan-keputusan hukum yang adil, tanpa mengistimewakan pihak yang kuat di atas kaum yang lemah.

Tampak adanya persamaan dan perbedaan antara pandangan serta praksis yang berlaku dalam konteks Mesir dan Mesopotamia. Pemimpin dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, dengan tanggung jawab untuk memberi perhatian bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan di bidang sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, dalam konteks Mesopotamia, sistem pemerintahan dan tatanan hidup bersama dijalankan tanpa terlalu mengacu pada peran dewa-dewi. Hubungan pemimpin dengan dewa-dewi tidak sekuat seperti yang diyakini dalam konteks Mesir; dan karena itu, tidak ada satu pun Raja Mesopotamia yang didewakan.

Dalam peradaban Persia atau Iran, etika politik tampak lewat kebijakan pemimpin yang memasukkan keragaman suku dan bangsa serta keyakinan, sebagai bagian integral dari penghargaan akan perbedaan. Re-

zim yang berkuasa diidentifikasi dengan semangat multikulturalisme. Para pemimpin menjalankan kebijakan pemerintahan secara terbuka tanpa terlalu melakukan intervensi atau campur tangan terhadap pihak-pihak yang ditaklukkan. Raja-raja Persia secara tidak langsung memberikan perhatian lebih eksplisit pada keragaman, dan mengizinkan pihak-pihak yang dikalahkan untuk memerintah diri mereka sendiri dengan ruang otonomi yang cukup sebagai ahli waris sah dari monarki lokal. Darius (m. 486 SM) dengan gelar "raja segala raja" (Black, 2016, 45), misalnya, membangun tata kelola dan pengaturan yang mengantar pada pemerintahan di wilayah yang lebih kecil dalam bentuk provinsi-provinsi dengan pemimpin-pemimpin lokal. Sebuah ikonografi dari kerajaan Akhemeniyah menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara raja dan rakyat terbangun sebagai suatu "konsensus", bukan "paksaan". Suatu perayaan penghormatan digambarkan sebagai peristiwa yang diikuti secara sukarela oleh pemimpin-pemimpin lokal sebagai perwakilan dari wilayah bawahan.

“

Dewa matahari, Ra,  
telah menempatkan raja  
di bumi untuk mengatur  
warga. Etika kepemimpinan,  
dengan demikian,  
terkait erat dengan alam.  
Konsekuensinya, ke-  
beradaan semesta yang  
terbuka bagi semua pihak  
menuntut orang untuk  
melestarikan alam, bukan  
demi keuntungan pribadi,  
tetapi demi kepentingan  
bersama.

Jadi, sikap yang terbuka dan penghargaan terhadap budaya dan kepercayaan lain mendapat tekanan lebih kuat. Raja Koresh (m. 530 SM), misalnya, memberi ruang terbuka pada pelaksanaan kultus lain, di samping kultus yang bercorak Persia. Setelah menaklukkan Babel pada tahun 539 SM, Koresh membuat keputusan tegas:

Aku kembali ke kota-kota suci di seberang Sungai Tigris yang tempat-tempat sucinya telah hancur, yang di sana dulunya juga terpampang gambar-gambar dan berdiri tempat-tempat pemujaan. Aku mengumpulkan semua pihak yang dulu menghuni kota-kota itu; dan aku mengembalikan mereka ke hunian asal mereka (Yana, 2008, 24).

Itu pula alasannya, mengapa orang-orang Yahudi dapat kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Kuil Yahweh. Artaxerxes I (m. 424 SM), misalnya, atas dasar catatan dari Kitab Ezra (Ez. 7: 11-26), memberi otonomi hukum dan wewenang kepada orang Yahudi untuk memberlakukan hukum Musa. Dengan demikian, Raja-raja Persia mengenakan pendekatan baru dalam sistem kepemimpinan; dan cara itu rupa-rupanya telah menjadikan Persia sebagai jembatan penghubung dengan peradaban dari latar

belakang India, Mesopotamia, Yunani, termasuk dengan masyarakat suku yang tak terhitung jumlahnya.

Pada abad keenam dan kelima Sebelum Masehi, selama dan setelah masa pembuangan, orang-orang Yahudi telah mengembangkan pandangan yang berbeda tentang apa artinya menjadi suatu bangsa. Dalam konteks ini, berkembanglah sikap relasional antara Allah, raja, dan rakyat. Corak dan status keberadaan orang-orang Yahudi dibangun atas dasar hubungan mereka yang unik dengan Allah. Apa yang tampak baru di sini, dalam kaitannya dengan tatanan sosial, adalah relasi dengan Allah tidak pertama-tama terbangun dengan raja, tetapi dengan seluruh bangsa. Ini dinyatakan sebagai sebuah perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Poin pentingnya adalah bahwa tempat dan kedudukan warga masyarakat dalam sebuah bangsa, secara keseluruhan telah diangkat. Keistimewaan status tidak menjadi monopoli sang pemimpin; seluruh bangsa mendapat tempat yang terhormat di hadapan Allah selaku pemberi dan penentu hukum yang mengatur perilaku hidup sehari-hari. Persamaan hak dan tanggung jawab pun menjadi milik semua anggota masyarakat.

Dalam peradaban Timur Tengah, sehubungan dengan tata kepemimpinan dan perilaku etis, yang tampak sangat mencolok adalah umat selaku warga masyarakat mendapat peran yang jauh lebih besar. Nuansa harapan lebih digemakan. Dikatakan, sekalipun ada pada masa kehancuran, mereka akan tetap mendapat perhatian. Karena itu, mereka mampu memaknai secara positif pengalaman pada masa-masa sulit di tempat pembuangan dan pengasingan di Babel (587-538 SM) dalam kerangka penempaan diri untuk memperkuat solidaritas sebagai satu bangsa. Ini berpengaruh pula dalam cara pandang tentang *mesias* atau pemimpin yang akan membawa pada kebenaran dan kesejahteraan sejati. Pemimpin yang sejati adalah pribadi yang mampu mengantar warga masyarakat pada pembebasan. Nilai-nilai etis-spiritual dan moralitas adalah pembebasan, yang awalnya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, sejatinya ditujukan pula bagi seluruh manusia.

Dalam peradaban India, pula satu kata kunci yang menjadi pegangan adalah *dharmā*. Arti di balik ungkapan ini beragam, seperti prinsip etis, hukum kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, kebajikan, dan tatanan sosial. Meskipun demikian, layak dicatat bahwa etika politik dalam peradaban India kuno sebenarnya berkembang dalam dua arah, tidak hanya dalam pengertian *dharmā* atau pemikiran yang terkait dengan *dharmā*, namun

“

Pemimpin yang sejati adalah pribadi yang mampu mengantar warga masyarakat pada pembebasan. Nilai-nilai etis-spiritual dan moralitas adalah pembebasan, yang awalnya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, sejatinya ditujukan pula bagi seluruh manusia.

juga *artha*. Dalam hal ini orang diingatkan pada *Artha-shastra* yang ditulis oleh seorang filsuf dan ahli politik India kuno, Kautilya, atau dikenal juga sebagai Chanakya (m. 283 SM). Nama *artha-shastra* berasal dari kata Sansekerta, *artha*, yang berarti maksud atau tujuan, sementara *shastra* berarti risalah. Isi penulisan karya ini untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum tata negara yang memungkinkan seorang raja memerintah secara efektif lewat keputusan-keputusan konkret guna menanggapi persoalan-persoalan riil di depan mata. Sebagai buku pegangan yang disusun untuk pendiri Kerajaan Maurya, Chandragupta (m. 295 SM), *Artha-shastra* memuat ajaran yang mengulas upaya-upaya untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan, melakukan perluasan wilayah negara, dan memperhatikan keamanan atau ketertiban sosial dengan pendekatan yang bersifat pragmatis. Dasarnya lebih bertolak dari pengalaman serta pengamatan empiris, daripada pemikiran dengan landasan otoritas tekstual.

Tegangan antara tuntutan *dharma* dan kebutuhan nyata yang dihadapi dalam realitas konkret terlukis secara indah dalam epik Mahabharata, misalnya, lewat kisah tentang Bisma dan Arjuna. Bisma yang dikisahkan tumbuh sebagai seorang pemuda kuat dan bijak di Kerajaan Hastinapura, dianggap akan tanpa kesulitan mencapai tampuk kekuasaan tertinggi. Namun, nyatanya Bisma memutuskan untuk melepaskan haknya atas takhta Hastinapura demi tercapainya keinginan Ayahandanya, Prabu Santanu, yang hendak menikahi Dewi Satyawati. Ini terkait dengan tuntutan Satyawati, bahwa hanya keturunan dari dialah yang nantinya memiliki hak untuk berkuasa. Bisma, lebih berpegang pada *artha* daripada *dharma*, bersumpah untuk tidak menikah. Dengan demikian ia tidak akan memiliki keturunan yang akan menjadi penguasa Hastinapura.

Kisah tentang Bisma menunjukkan bahwa kepemimpinan tak jarang dipicu oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis-fungsional. Sementara itu, Arjuna dikisahkan mengalami konflik batin dan emosi ketika dihadapkan pada tuntutan praktis di tengah peperangan melawan guru dan saudara-saudaranya sendiri. Seperti Bisma, Arjuna dihadapkan pada pilihan antara *dharma* dan *artha*. Pada malam terakhir pertempuran, Kreshna memberikan wejangan yang mengantar pada pandangan bahwa mengelak dari sebuah perjuangan demi suatu kebenaran sama artinya dengan meninggalkan tugas kewajiban dan mencederai

“

Para tokoh Konfusianis menekankan bahwa sikap dan tindakan seorang penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya harus memperhatikan faktor keteladanan dalam hal moralitas dan keluhuran budi serta keadilan.

kehormatan; dan itu berarti sebuah pelanggaran. Arjuna pun dengan langkah mantap maju ke laga peperangan.

Kautilya bersikeras bahwa kesejahteraan material lebih penting daripada kenyamanan batin atau kesenangan lahiriah, karena keduanya bergantung pada kesejahteraan material. Prinsip *Artha-shastra* tampak dalam diri Bisma yang mengorbankan kesenangan lahiriah, dan dalam diri Arjuna yang mengorbankan kenyamanan batin. *Artha-shastra*, dengan begitu, menjadi kebalikan dari *Bhagavad Gita* yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam tindakan. Pendekatan *Artha-shastra* memperlihatkan nilainya tersendiri, yaitu upaya untuk menyelaraskan antara cita-cita ideal moral dengan keputusan praktis yang membumi, sesuai dengan tantangan kontekstual yang dihadapi secara riil.

Selanjutnya, dalam peradaban Tiongkok kuno, pada masa tertentu, pemimpin dipandang sebagai “putra langit” yang memiliki aspirasi etis dan mistik. Fungsi negara mendapat penegasan yang cukup kuat. Sistem pemerintahan yang menghubungkan dimensi etis dan politis dijalankan dengan pendekatan yang melibatkan sejumlah pihak dengan corak beragam, seperti Konfusian, Taois, dan Legalis. Konfusianisme memberi penekanan kuat pada prinsip-prinsip etika, seperti kebajikan, kebenaran, kesetiaan, dan bakti. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dianggap penting bagi perilaku individu, tetapi juga bagi suatu kekuatan sosial semacam



lewat ilmu kedokteran. Menurutnya, ini merupakan seni untuk menyiasati kondisi-kondisi yang, langsung atau tak langsung, menentukan tindakan dan perilaku individu dalam memaknai hidupnya di tengah tatanan sosial. Seni juga menunjuk pada kemampuan untuk mengolah kekuasaan, sebagaimana seorang “ahli” yang, dengan kepiawaian dan “jiwa” artistiknya, mau membentuk suatu hasil karya secara indah.

Al-Farabi membangun pandangan yang positif tentang ilmu politik sebagai ilmu penting yang memberi perhatian pada perilaku manusia, termasuk moralitas, tindakan, dan cara bertindak yang diupayakan untuk meraih tujuan hidup, yaitu kebahagiaan sejati. Kajiannya memiliki aspek moral karena menyentuh hal-hal yang mendukung ke arah kebahagiaan – yaitu kebajikan – dan hal-hal yang melawan ke arah itu seperti tampak dalam bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu politik juga merupakan suatu bentuk filsafat karena kajiannya terarah pada pencarian pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat universal sekaligus mendalam. Ini dibangun lewat jalan pengamatan dan pengalaman atas proses panjang yang ditempuh oleh manusia dalam menyikapi persoalan-persoalan seputar kebajikan dan kejahatan.

“

Al-Farabi membangun pandangan yang positif tentang ilmu politik sebagai ilmu penting yang memberi perhatian pada perilaku manusia, termasuk moralitas, tindakan, dan cara bertindak yang diupayakan untuk meraih tujuan hidup, yaitu kebahagiaan sejati.

Ilmu politik mau tidak mau bersinggungan dengan suatu bentuk tata peraturan lewat kepemimpinan. Dari perspektif tertentu, tanggung jawab individu mendapat perhatian. Dari perspektif lain, al-Farabi juga berbicara tentang pemimpin yang bertugas untuk mengawal individu-individu sedemikian rupa sehingga tujuan kebahagiaan yang dicanangkan oleh masing-masing individu dapat tercapai, dan pada saat yang sama kepentingan bersama tetap terpenuhi. Untuk itu, menurutnya, pemimpin harus mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, dengan aspek rasionalitas dan sekaligus spiritualitasnya. Pemimpin ideal – yang oleh Plato disematkan dalam diri filsuf – dimaknai oleh al-Farabi dalam konteks Islam Syiah ada pada diri Imam.

Pemaknaan akan tata pemerintahan dan politik sebagai sebuah hasil karya seni (*sina'a*) juga digaungkan oleh filsuf sezaman dengan al-Farabi, yaitu Abu Zayd al-Balkhi (m. 934). Sebagaimana obat dikembangkan untuk mengupayakan kesehatan, menurut al-Balkhi, kemampuan untuk menata hidup bersama dalam kancan politik dikembangkan untuk tercapainya kesejahteraan umum (*maslaha*) dalam hidup aktual di dunia. Para pemimpin yang berurusan dengan persoalan-persoalan hidup bersama memberi perhatian untuk menjaga fitrah manusia yang berasal dalam kondisi baik dan menyikapi kecenderungan-kecenderungan negatif akibat penyimpangan dan kesesatan cara pandang serta cara bertindak.

Pandangan al-Farabi yang bergaung pada pemikiran Abu Zayd al-Balkhi, selanjutnya diikuti oleh kelompok yang berkembang pada sekitar abad ke-10 Masehi, yaitu *Ikhwan al-Shafa*. Berkenaan dengan argumentasi mereka tentang kualifikasi sejumlah figur yang berpengaruh dalam tatanan sosial, mereka berbicara mengenai parameter tertentu.

*Pertama*, kualitas figur pemimpin yang disejajarkan dengan para nabi dan kaum filsuf. Mereka harus memiliki kematangan dalam banyak perkara; dan usia mereka sekurang-kurangnya 50 tahun. Mereka itulah yang dapat diharapkan akan mampu mencerahkan banyak pihak lewat cara pandang dan cara hidup yang penuh martabat rajawi (*al-martabat al-malakiyya*).

*Kedua*, kualifikasi yang setara dengan seorang figur seperti sultan, dengan usia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan memiliki pemikiran serta perilaku yang bijaksana, unggul, serta terpuji (*al-fudala' al-kiram*). Selanjutnya, kualifikasi seorang pemuksa masyarakat yang dilukiskan minimal berusia 30 tahun dan memiliki sikap

arif serta dapat diandalkan (*al-akhyar wa al-fudala*), dan kualifikasi seorang yang cakap atau terampil, dengan usia lebih dari 15 tahun dan layak diteladani dalam kepakaran, kesalehan, serta perhatian sosial (*al-abrar wa al-ruhama*).

Filsuf lain yang perlu pula diangkat adalah Ibn Sinna (m. 1037). Salah satu pendapatnya yang mungkin dapat mengundang silang pendapat adalah bahwa dalam situasi tertentu, perlawanan terhadap pemimpin dan rezim yang berkuasa lewat pemberontakan bukanlah hal yang tabu (bdk. Black, 2011: 75). Jika ada seorang pemimpin yang membuat klaim sepihak atas dasar kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki bahwa dia merupakan pihak yang berhak memegang tampuk kepemimpinan, maka menjadi tugas setiap warga masyarakat untuk melawan dan menyingkirkannya. Seandainya ada pihak yang mampu menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa memang tidak layak, atau malah sama sekali tak memadai, maka parameter yang dapat dikenakan dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini adalah aspek kemendesakan, bahwa perebutan kekuasaan perlu dilakukan atas dasar alasan-alasan darurat. Dalam hal ini, setiap warga harus bersedia menerima klaim dari pihak yang menggulingkan kekuasaan.

Dengan mengikuti pandangan al-Farabi, Ibn Sinna juga mendukung pembagian peran di dalam masyarakat. Sebagian anggota masyarakat dikatakan berperanan sebagai penangung jawab di bidang administrasi, sebagian lain sebagai pelaku usaha, dan sebagian lainnya lagi di wilayah keamanan atau ketertiban sosial. Fungsi pemerintah adalah mendistribusikan kembali hasil yang diperoleh dari pihak pelaku usaha, seperti petani atau pengrajin atau pedagang, ke kelompok-kelompok yang tidak mempunyai urusan langsung dengan produksi, seperti tentara, pegawai negeri, dan terutama kaum miskin serta difabel. Di samping itu, para pemimpin bertanggung jawab pula untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh individu-individu yang malas bekerja atau menganggur. Pekerjaan-pekerjaan yang menyalahgunakan kekayaan dan meracuni semangat produktif, seperti perjudian, wajib ditindak tegas. Ringkasnya, pemimpin perlu menguasai secara andal cara-cara untuk mengatur pasar hingga upaya-upaya untuk mengawasi atau menegakkan moral publik.

Berbicara seputar tata pemerintahan dan politik dari kalangan filsuf muslim, nama Ibn Rushd (m. 1198) perlu mendapat perhatian istimewa. Ia mengembangkan

“

Jika ada seorang pemimpin yang membuat klaim sepihak atas dasar kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki bahwa dia merupakan pihak yang berhak memegang tampuk kepemimpinan, maka menjadi tugas setiap warga masyarakat untuk melawan dan menyingkirkannya.

pemikirannya dalam komentarnya atas karya Aristotele, *Nicomachean Ethics*, dan atas karya Plato, *Republic*. Ibn Rushd berpendapat bahwa *Nicomachean Ethics*, dengan analisis konseptualnya tentang kebajikan dan nilai-nilai moral, memuat kajian teoritis Aristoteles seputar politik dan hukum. Pada bagian akhir dari *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membahas hukum yang berperanan sebagai salah satu cara bagi kebanyakan orang untuk mencapai kebajikan dan menanamkan tertib sosial. Bagi Aristoteles, semua itu merupakan langkah awal untuk memasuki ranah politik dan pemerintahan. Ibn Rushd berpikir bahwa kajian atas karya Aristoteles akan menjadi lengkap bila disertai dengan kajian praktis tentang politik dan penyusunan hukum dalam tata pemerintahan sipil. Sayangnya, tulisan Aristoteles yang memuat gagasan tersebut tak dapat diperoleh Ibn Rushd. Akhirnya Ibn Rushd membuat kajian lewat komentarnya terhadap pandangan Plato tentang negara.

Komentar Ibn Rushd atas *Republic* terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian I dan II mengulas keadaan yang bersifat ideal, seperti tampak dalam tema pendidikan kaum muda dan filsuf selaku pemimpin paling unggul.

dalam kehidupan personal, dan di tengah pelayanan publik. Pilar pertama yang melibatkan hubungan spiritualnya dengan Tuhan diistilahkan sebagai *coram Deo*, sedangkan pilar kedua sebagai *coram hominibus*, dan pilar ketiga sebagai *coram mundo*. (Troy, 2010; <https://papers.ssrn.com>)

Kiprah Hammarskjöld selaras dengan praksis yang terarah pada kebaikan bersama. Ia menyatukan etika religius dan penghayatan mistik pribadi yang dianutnya dalam tanggung jawab serta keterlibatan sosial dengan prinsip mau menyikapi masalah-masalah internasional secara netral. Etika dan mistik Hammarskjöld bersumber pada nilai universal yang melampaui perbedaan dan kepentingan pribadi.

Hammarskjöld juga dipengaruhi oleh mistikus Thomas a Kempis (m. 1471), Yohanes dari Salib (m. 1591), dan Meister Eckhart (m. 1328). Ia memegang erat ajaran Yohanes dari Salib tentang aspek rasional dari iman, harapan, dan kasih. Pada dasarnya, ketiga nilai tersebut mengantar orang untuk mengarahkan diri dalam kegembiraan pada gerak vertikal menuju *Thou* (Engkau – Tuhan) dan sekaligus juga pada gerak horizontal menuju *thou* (engkau – sesama). Bagi Hammarskjöld, mistikus tidak boleh terlepas dari dunia nyata atau menjadikan dirinya tujuan *an sich*. Hammarskjöld menghayati hidup mistiknya atas dasar *dictum*, seperti yang ditekankan oleh Thomas a Kempis, "Jika Anda mengandalkan diri sendiri, tidak akan ada yang tercapai, tetapi jika Anda mengandalkan Allah, kasih karunia surgawi akan membebaskan Anda." *Dictum* itu dimaknainya dengan memaklumkan nilai-nilai universal, seperti kasih, harapan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, penghargaan akan keberbedaan, pengorbanan diri, kerja sama, belarasa, dan sikap tidak memihak, ke dalam aktivitas politik yang konkret. Peristiwa kelam yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, seperti Perang Dunia I dan II, juga Holocaust, mengantar Hammarskjöld pada sikap peduli akan pelayanan demi kebaikan bersama. Ini terwujud secara konkret dalam pendekatan dan upaya diplomatiknya untuk menyikapi tegangan antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 1952–1954, krisis Terusan Suez pada tahun 1956–1957, dan misi perdamaian di Kongo pada tahun 1960–1965. Dalam *Markings*, ia menegaskan:

Perlakukan orang lain sebagai tujuan, jangan pernah sebagai sarana; dan tentang diri sendiri sebagai tujuan, maknailah dalam kapasitas sebagai sarana,

untuk menggeser garis pemisah dalam keberadaan saya sebagai subjek di hadapan objek, ke posisi di mana subjek, bahkan jika itu terkandung di dalam saya, berada di luar dan di atas saya, sedemikian rupa sehingga seluruh keberadaan saya dapat menjadi sarana bagi apa yang lebih besar dari saya. (Hammarskjöld, 1964, 46)

Maksudnya jelas; Hammarskjöld ingin selalu menempatkan sesama dan kepentingan bersama bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang melampaui diri pribadi dan kepentingan personal.

### Tanggapan Reflektif

Pemikiran, kearifan, dan praksis yang dijumpai dari para tokoh dalam lintasan aneka peradaban telah membuka mata akan pentingnya peran pemimpin. Tantangannya terkait dengan tanggung jawab pemimpin untuk melestarikan alam demi kepentingan bersama, melindungi pihak yang lemah dari bayang-bayang dominasi pihak yang lebih kuat, membuat keputusan praktis yang membumi sesuai dengan konteks yang riil, membangkitkan solidaritas sosial yang positif, memberi keputusan yang adil, menghargai keberbedaan, menyelaraskan antara kebebasan yang bertanggung jawab dan penegakan hukum yang berwibawa, serta memberi perhatian pada pembangunan fisik dan ekonomis yang sesuai dengan harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

Kenyataannya, pada masa kini, tegangan antara etika dan politik hadir semakin kompleks dalam aneka persoalan. Penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan tindakan oportunistik untuk memperkaya diri atau kelompok sungguh terjadi; dan itu telah mengakibatkan ketimpangan pada level alokasi atau distribusi sumber daya, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan informasi yang terbuka juga tidak selalu terwujud, padahal itu akan dapat membantu gerak masyarakat dalam menangani isu-isu seputar lingkungan, hak-hak buruh dan ketidaksetaraan pendapatan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan lain-lain.

Upaya untuk menyikapi dunia politik tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Permasalahan muncul ketika orang meninjau realitas konkret. Dalam konteks Indonesia, tegangan antara etika dan

politik tampak kentara. Ingar bingar dan hiruk pikuk menyongsong tahun politik 2024 sudah terdengar. Sejumlah pemimpin menanggapi dengan menempatkan diri sebagai seorang politikus murni, sejumlah lainnya juga menampilkan atribut tambahan, misalnya sebagai seorang pemuka agama, atau akademikus, atau yang lain. Sayangnya, pernyataan kritis dan keras yang mereka lontarkan tak selalu bersesuaian dengan realita dan kiprah serta sepak terjang sehari-hari mereka. Ada pula figur yang hanya berhenti pada retorika tanpa aksi nyata, atau figur yang memberi kesan mau begitu saja mengubur memori kelam yang mencederai rasa kemanusiaan pada masa lampau.

Misalnya, ada figur yang mau menagih janji kepada presiden, karena katanya ada 66 janji presiden yang tidak ditepati sejak kampanye pada 2019, padahal janji dia sendiri yang disuarakan dengan gegap gempita beberapa tahun lalu dalam sebuah nazar – bila figur yang ditentangnya menang dalam pemilihan sebagai kepala negara, ia akan menempuh perjalanan jauh, dari satu kota ke kota yang lain dengan berjalan kaki – belum terpenuhi. (<https://www.kompas.tv/> – <https://www.pikiran-rakyat.com/>). Selain itu, ada pula tokoh yang melontarkan kata-kata kasar, padahal dia menganggap diri seorang intelektual, sedemikian rupa sehingga memberi kesan bahwa pihak yang bersangkutan seperti tengah mendelegitimasi dirinya sendiri, sampai-sampai lalu dipandang sebagai figur tak intelek. Salah satu kata-kata bijak dari figur yang terakhir disinggung di sini adalah: “Menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional.” Tetapi, rupa-rupanya pihak yang bersangkutan malah terjebak dalam kekerasan verbal dan hilang akal (<https://galamedia.pikiran-rakyat.com>).

Boleh jadi, semua poin di bagian awal tulisan ini memberi kesan serba normatif. Seolah-olah poin-poin etis ada pada satu ranah tertentu, dan realitas politik yang konkret ada pada ranah lain. Tentu, ini tak sepenuhnya benar, karena selalu saja ada tokoh-tokoh yang dapat diangkat sebagai contoh bagaimana mereka berupaya untuk menempatkan diri di tengah-tengah tegangan tersebut. Dag Hammarskjöld adalah salah seorang figur yang dapat disebut di sini. Dia telah memberi pemaknaan segar, bahwa kepemimpinan dalam kelompok sosial yang luas dapat dihidupi secara

positif dengan mendasarkan diri pada cara pandang dan cara bertindak yang dilandasi nilai-nilai universal dan terarah ke kemaslahatan publik (*bonum commune*). ●

**Dr. Heru Prakosa,**

dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

## RUJUKAN

- Black, Antony, *A World History of Ancient Political Thought*, (Oxford: Oxford University Press, 2016 edisi revisi).
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011 cet. ke-2).
- Farabi, Al-, *The Political Writings*, (Ithaca: Cornell University Press, 2001).
- Frankfort, Henri, *Kingship and the Gods*, (Chicago: University of Chicago Press, 1978).
- Ghazali, Al-, *Counsel for Kings – Nashiat al-Muluk*, (London: Oxford University Press, 1964).
- Hammarskjöld, Dag, *Markings*, (New York: Ballantine Books, 1964).
- Troy, Jodok, “Dag Hammarskjöld An International Civil Servant uniting Mystics and Realistic Diplomatic Engagement”, dlm. *Diplomacy & Statecraft*, (2010, 21, no. 3 [2010]), 434-450.
- Yana, George, V. *Ancient and Modern Assyrians*, (Bloomington: Xlibris, 2008).
- [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2984377](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2984377)
- <https://www.deccanchronicle.com/opinion/op-ed/190119/mystic-mantra-sufis-on-ethics-and-politics.html>
- <https://themaydan.com/2019/01/theology-obedience-analysis-shaykh-bin-bayyah-shaykh-hamza-yusuf-political-thought/>
- <https://www.kompas.tv/nasional/133321/amien-rais-ditagih-janji-jalan-kaki-dari-yogyakarta-ke-jakarta-oleh-politisi-pdip>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016892973/amien-rais-sebut-ada-66-janji-jokowi-yang-tidak-ditepati-salah-satunya-soal-utang>
- <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351421821/kumpulan-kata-kata-bijak-rocky-gerung-bagian-2-rindu-tak-pernah-menetap-tapi-ia-selalu-kembali?page=3>